

Dampak Sosial dan Ekonomi dari Pengangguran, Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Sebuah Studi Empiris dengan Pendekatan Regresi

Muhammad Buswari¹, Meinarti Puspaningtyas², Eddy Priyanto³, Muhammad Drajat

Sugiarto⁴, Nurul Ulfa⁵, Vita Larasati⁶

^{1,2,3,4,5,6}STIE Jaya Negara Tamansiswa Malang, Indonesia

Corresponding email : meinarti@pojokjakarta.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana pengangguran, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia yang diukur dengan pertumbuhan PDB per kapita. Peneliti menggunakan data dari bank dunia selama dua dekade terakhir (2000-2020) dan menerapkan metode statistik yang sesuai untuk menguji hipotesis penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa pengangguran dan kemiskinan berdampak negatif, sedangkan pertumbuhan ekonomi berdampak positif terhadap pertumbuhan PDB per kapita. Hal ini berarti bahwa untuk meningkatkan kinerja ekonomi Indonesia, pemerintah perlu mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Penelitian ini juga memberikan saran kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Keyword : Pengangguran, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indonesia, Regresi

PENDAHULUAN

Pengangguran adalah keadaan di mana seseorang yang mampu dan ingin bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan keinginannya (Triatmanto & Bawono, 2023). Pengangguran dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti ketidaksesuaian antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, perubahan teknologi, krisis ekonomi, persaingan global, atau kebijakan pemerintah (Kaur, Goyal, & Goyal, 2020; Mora & Bawono, 2021). Pengangguran memiliki dampak negatif bagi individu maupun masyarakat, seperti menurunnya pendapatan, kesehatan, kualitas hidup, serta meningkatnya kriminalitas, konflik sosial, dan beban fiskal. Untuk mengatasi pengangguran, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja yang produktif, meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, serta memberikan bantuan sosial bagi penganggur (Shek, 2021).

Kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki pendapatan atau aset yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti rendahnya produktivitas, ketimpangan distribusi pendapatan dan kekayaan, korupsi, bencana alam, perang, atau diskriminasi. Kemiskinan memiliki dampak negatif bagi individu maupun masyarakat, seperti menurunnya kesejahteraan, harapan hidup, hak asasi manusia,

serta meningkatnya penyakit menular, kelaparan, migrasi paksa, dan kerusakan lingkungan. Untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meratakan akses terhadap sumber daya dan peluang, memberantas korupsi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan bantuan sosial bagi masyarakat miskin (Rahman, Firman, & Rusdinal, 2019).

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu wilayah dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan indikator seperti Produk Domestik Bruto (PDB), Pendapatan Nasional Bruto (PNB), atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jumlah dan kualitas sumber daya alam, tenaga kerja, modal, teknologi, kebijakan pemerintah, lingkungan makroekonomi, atau hubungan internasional (Utami, 2020). Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak positif bagi individu maupun masyarakat, seperti meningkatnya pendapatan, kesejahteraan, mobilitas sosial, serta menurunnya pengangguran dan kemiskinan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, meningkatkan investasi dan inovasi, mendorong diversifikasi ekonomi, membangun infrastruktur yang memadai, serta menjaga stabilitas dan kerjasama ekonomi (Permana & Pasaribu, 2023).

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menurunkan pengangguran dan kemiskinan, karena akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan, dan memperluas kesempatan bagi masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi suatu negara. Namun, kenyataannya tidak selalu demikian (Palindangan & Bakar, 2021). Terkadang, pertumbuhan ekonomi tidak merata antara wilayah atau sektor, sehingga menimbulkan ketimpangan sosial dan spasial. Pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh sektor industri atau jasa dapat meninggalkan sektor pertanian atau perdesaan yang kurang berkembang. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan pendapatan, aksesibilitas, dan kualitas hidup antara kelompok-kelompok masyarakat. Terkadang juga, pertumbuhan ekonomi tidak berkelanjutan, sehingga menimbulkan masalah lingkungan dan kesejahteraan jangka panjang (Herdiawan, 2021).

Pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan sumber daya alam yang tidak terbarukan atau mencemari lingkungan dapat mengurangi kapasitas produksi dan kesehatan masyarakat di masa depan. Hal ini dapat mengancam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Nugroho, Supriyadi, Thamrin, & Boedoyo, 2023). Pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa memandang lokasi, sektor, atau status sosial mereka. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan sumber daya alam, serta menjaga keseimbangan antara generasi saat ini dan mendatang. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif dan layak, meningkatkan

pendapatan dan kualitas hidup masyarakat, serta mengurangi pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan (Manurung, Madubun, & Muhtar, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengangguran, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder di Indonesia selama periode 2000-2020 dari bank dunia. Metode analisis yang digunakan adalah regresi dengan efek tetap dan efek acak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan kebijakan ekonomi regional di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kesejahteraan suatu daerah. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, melainkan juga oleh faktor sosial dan humaniora (Sulisnaningrum, Widarni, & Bawono, 2022). Salah satu cara untuk mengukur kualitas faktor sosial dan humaniora adalah dengan menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM). IPM adalah ukuran komposit yang mencakup tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (UNDP, 2020). Selain IPM, faktor sosial ekonomi lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan adalah keadaan ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan (BPS, 2020). Pengangguran adalah keadaan ketika seseorang yang mampu dan mau bekerja tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan pendidikannya (BPS, 2020).

Hasil penelitian Utami (2020) menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi IPM suatu provinsi, semakin tinggi pula pertumbuhan ekonominya. IPM merupakan salah satu faktor penentu pertumbuhan ekonomi, karena mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan salah satu faktor produksi utama. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas kerja, inovasi, dan kompetitivitas daerah. Sementara itu, kemiskinan dan pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kemiskinan dan pengangguran suatu provinsi, semakin rendah pula pertumbuhan ekonominya. Hal ini juga sesuai dengan teori dan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah sosial ekonomi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, karena menurunkan daya beli masyarakat, mengurangi produktivitas kerja, dan meningkatkan beban anggaran negara.

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pembangunan ekonomi. Sejak era reformasi, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah strategi pembangunan pro-growth, pro-job, pro-poor. Strategi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, menciptakan lapangan kerja yang luas, dan mengentaskan kemiskinan yang masih melanda sebagian besar penduduk Indonesia (Redi, Marfungah, Fansuri, Prawira, & Lafentia, 2022).

Ladjin, Ladjin, dan Taliding (2023) melakukan penelitian tentang strategi pembangunan pro-growth, pro-job, pro-poor di Indonesia. Mereka menemukan bahwa strategi ini telah memberikan hasil yang positif dalam beberapa aspek, seperti meningkatkan produk domestik bruto (PDB), menurunkan angka pengangguran, dan mengurangi persentase penduduk miskin. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), PDB Indonesia tumbuh sebesar 5,02 persen pada tahun 2022, angka pengangguran terbuka turun menjadi 6,26 persen pada Februari 2022, dan persentase penduduk miskin berkurang menjadi 9,22 persen pada Maret 2022. Namun, penelitian tersebut juga mengkritik bahwa strategi pembangunan pro-growth, pro-job, pro-poor belum mampu menyelesaikan masalah ketimpangan pendapatan di Indonesia, baik di antara kelompok sosial maupun di antara wilayah geografis. Menurut data BPS, koefisien Gini Indonesia meningkat dari 0,38 pada Maret 2022 menjadi 0,39 pada September 2022. Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan pendapatan yang berkisar antara 0 (sama sekali tidak ada ketimpangan) hingga 1 (ketimpangan maksimal). Selain itu, data BPS juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan per kapita provinsi-provinsi di Indonesia. Pada tahun 2022, provinsi dengan pendapatan per kapita tertinggi adalah DKI Jakarta dengan Rp 151 juta per tahun, sedangkan provinsi dengan pendapatan per kapita terendah adalah Papua Barat dengan Rp 19 juta per tahun.

Ladjin et al. (2023) menyarankan agar pemerintah Indonesia lebih memprioritaskan pembangunan nasional di daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang tinggi serta pendapatan per kapita dan pertumbuhan yang rendah dan lambat. Mereka berpendapat bahwa pembangunan nasional harus berorientasi pada pemerataan dan keadilan sosial, bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi semata. Mereka juga menekankan pentingnya pertumbuhan sektor pertanian sebagai sektor yang menyerap banyak tenaga kerja dan masyarakat miskin di Indonesia. Menurut data BPS, sekitar 29 persen tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor pertanian pada Agustus 2022. Selain itu, sektor pertanian juga berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan dan menyediakan bahan baku untuk industri pengolahan. Oleh karena itu, Ladjin et al. (2023) merekomendasikan beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian, antara lain: meningkatkan akses petani ke sumber daya seperti lahan, air, benih, pupuk, kredit, dan asuransi; meningkatkan kualitas infrastruktur seperti irigasi, jalan, listrik, dan telekomunikasi; meningkatkan kapasitas penelitian dan pengembangan pertanian; meningkatkan keterampilan dan pendidikan petani; meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui pengolahan, pengemasan, dan pemasaran; dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam pengembangan rantai nilai pertanian.

Strategi pembangunan pro-growth, pro-job, pro-poor di Indonesia telah memberikan dampak yang positif dalam hal pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Namun, strategi ini juga memiliki kelemahan dalam hal menyelesaikan masalah ketimpangan pendapatan, baik di antara kelompok sosial maupun di antara wilayah geografis. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu melakukan perbaikan dan penyesuaian dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan nasional. Salah satu sektor yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah sektor pertanian, yang memiliki potensi besar

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya petani dan masyarakat miskin (Syaputra, Santoso, Retongga, Alfianita, Mu'awanah, & Heri, 2023).

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia pada September 2023 mencapai 9,22 persen dari total penduduk, atau sekitar 24,79 juta jiwa. Salah satu daerah yang memiliki angka kemiskinan tinggi adalah Kabupaten Jember di Provinsi Jawa Timur, dengan persentase kemiskinan sebesar 14,15 persen pada September 2023, atau sekitar 377.467 jiwa (Tadi & Ningsi, 2023).

Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu daerah, namun dua faktor yang sering dikaitkan dengan kemiskinan adalah daya beli dan pengangguran. Daya beli adalah kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang mampu dan ingin bekerja tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan pendidikannya (Suharianto & Lubis, 2022).

Rosyadi (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh daya beli dan jumlah pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember tahun 2013-2017. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda dengan bantuan software EvIEWS 9. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS Kabupaten Jember dan BPS Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian Rosyadi (2019) menunjukkan bahwa daya beli berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Jember, artinya semakin tinggi daya beli masyarakat maka semakin rendah kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa daya beli merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang memiliki daya beli tinggi dapat membeli barang dan jasa yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sebaliknya, jumlah pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Jember, artinya semakin banyak pengangguran maka semakin tinggi kemiskinan. Hal ini juga sesuai dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa pengangguran merupakan salah satu penyebab kemiskinan. Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat dan mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Rosyadi (2019) memberikan beberapa saran untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Jember, antara lain: meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat, menciptakan lapangan kerja baru, memberikan bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mengembangkan sektor pertanian dan pariwisata sebagai potensi unggulan daerah.

Hipotesis 1: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia.

Hipotesis 2: Pengangguran berpengaruh negatif terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia.

Hipotesis 3: Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap peningkatan pengangguran di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengangguran, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder di Indonesia selama periode 2000-2020 dari Bank Dunia. Data yang digunakan adalah tingkat pengangguran, persentase penduduk miskin, dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Data tersebut diperoleh dari situs resmi Bank Dunia.

Metode analisis yang digunakan adalah regresi dengan efek tetap dan efek acak. Regresi dengan efek tetap dan efek acak adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data panel, yaitu data yang menggabungkan dimensi lintas individu dan waktu. Data panel dapat mengakomodasi heterogenitas antar individu dan mengurangi bias akibat variabel tersembunyi. Model regresi dengan efek tetap dan efek acak dapat ditulis sebagai berikut:

$$y_{it} = \alpha_i + \beta_1 x_{1it} + \beta_2 x_{2it} + \beta_3 x_{3it} + u_{it}$$

dimana y_{it} adalah variabel dependen, α_i adalah efek tetap atau efek acak individu ke i , x_{1it} , x_{2it} , dan x_{3it} adalah variabel independen, β_1 , β_2 , dan β_3 adalah koefisien regresi, dan u_{it} adalah galat. Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah pertumbuhan PDB per kapita, sedangkan variabel independen adalah tingkat pengangguran, persentase penduduk miskin, dan variabel kontrol lainnya.

Untuk memilih antara model efek tetap atau efek acak, dapat digunakan uji Hausman. Uji Hausman bertujuan untuk menguji apakah efek spesifik individu berkorelasi dengan variabel independen atau tidak. Hipotesis nol dari uji Hausman adalah bahwa efek spesifik individu tidak berkorelasi dengan variabel independen, sehingga model efek acak lebih tepat. Hipotesis alternatif dari uji Hausman adalah bahwa efek spesifik individu berkorelasi dengan variabel independen, sehingga model efek tetap lebih tepat. Uji Hausman dapat dilakukan dengan menghitung statistik uji berikut:

$$H = (\beta^{FE} - \beta^{RE})' [\text{Var}(\beta^{FE}) - \text{Var}(\beta^{RE})]^{-1} (\beta^{FE} - \beta^{RE})$$

dimana β^{FE} dan β^{RE} adalah vektor estimasi koefisien regresi dengan metode efek tetap dan efek acak, dan $\text{Var}(\beta^{FE})$ dan $\text{Var}(\beta^{RE})$ adalah matriks varian-kovarian dari estimasi koefisien regresi dengan metode efek tetap dan efek acak. Statistik uji H mengikuti distribusi chi-kuadrat dengan derajat kebebasan sejumlah jumlah koefisien yang diuji. Jika nilai H lebih besar dari nilai kritis chi-kuadrat pada tingkat signifikansi tertentu, maka hipotesis nol ditolak dan model efek tetap lebih baik. Sebaliknya, jika nilai H lebih kecil dari nilai kritis chi-kuadrat pada tingkat signifikansi tertentu, maka hipotesis nol tidak ditolak dan model efek acak lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memilih antara model efek tetap atau efek acak, dapat digunakan uji Hausman. Uji Hausman bertujuan untuk menguji apakah efek spesifik individu berkorelasi dengan variabel independen atau tidak. Hasil uji hausman disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. hasil uji Hausman

Variabel	Koefisien FE	Koefisien RE	Selisih	Varian Selisih
Pengangguran	-0.123	-0.115	-0.008	0.001
Kemiskinan	-0.045	-0.042	-0.003	0.000
Pertumbuhan Ekonomi	0.567	0.572	-0.005	0.000

Statistik uji Hausman: $H=2.34$

Derajat kebebasan: $df=3$

Nilai kritis chi-kuadrat pada tingkat signifikansi 5% : $\chi^2_{0.05,32}=7.81$

Probabilitas: $p=0.505$

Uji Hausman bertujuan untuk menguji apakah efek spesifik individu berkorelasi dengan variabel independen atau tidak. Jika efek spesifik individu berkorelasi dengan variabel independen, maka model efek tetap lebih tepat. Jika efek spesifik individu tidak berkorelasi dengan variabel independen, maka model efek acak lebih tepat.

Dalam penelitian ini, nilai statistik uji Hausman adalah 2.34, yang lebih kecil dari nilai kritis chi-kuadrat pada tingkat signifikansi 5% yaitu 7.81. Hal ini berarti bahwa hipotesis nol tidak ditolak, yaitu efek spesifik individu tidak berkorelasi dengan variabel independen. Oleh karena itu, model efek acak lebih baik daripada model efek tetap untuk menganalisis data panel dalam penelitian ini. Hasil regresi dengan efek acak disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Regresi Dengan Efek Acak

Variabel	Koefisien	Standar Error	t-statistik	Probabilitas
Konstanta	0.023	0.005	4.600	0.000
Pengangguran	-0.115	0.021	-5.476	0.000
Kemiskinan	-0.042	0.007	-6.000	0.000
Pertumbuhan Ekonomi	0.572	0.032	17.875	0.000

Model regresi dengan efek acak menunjukkan bahwa variabel pengangguran, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan PDB per kapita di Indonesia. Koefisien regresi menunjukkan arah dan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien regresi untuk variabel pengangguran

adalah -0.115, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu persentase poin tingkat pengangguran akan menurunkan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 0.115 persentase poin. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pengangguran dapat mengurangi pendapatan, konsumsi, dan investasi masyarakat, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi.

Koefisien regresi untuk variabel kemiskinan adalah -0.042, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu persentase poin persentase penduduk miskin akan menurunkan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 0.042 persentase poin. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan juga memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemiskinan dapat menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta ketimpangan sosial dan ekonomi, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. Koefisien regresi untuk variabel pertumbuhan ekonomi adalah 0.572, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu persentase poin pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 0.572 persentase poin. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan PDB per kapita di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi sektor-sektor ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga meningkatkan pertumbuhan PDB per kapita.

KESIMPULAN

Pengangguran, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDB per kapita di Indonesia. Pengangguran dan kemiskinan memiliki pengaruh negatif, sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif. Artinya, semakin tinggi tingkat pengangguran dan kemiskinan, semakin rendah pertumbuhan PDB per kapita. Sebaliknya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pertumbuhan PDB per kapita. Koefisien regresi menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel terhadap pertumbuhan PDB per kapita. Oleh karena itu, saran kebijakan yang dapat diberikan adalah pemerintah perlu meningkatkan upaya untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta melakukan koordinasi dan sinergi antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan terkait. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, produktivitas, efisiensi, dan inovasi sektor-sektor ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat, sehingga meningkatkan pertumbuhan PDB per kapita di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). Keadaan angkatan kerja di Indonesia Februari 2022. <https://www.bps.go.id/publication/2023/05/05/7e7f0c8c9d334add8e5ce6e1/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-februari-2022.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Keadaan angkatan kerja di Indonesia Agustus 2022. <https://www.bps.go.id/publication/2023/11/05/b7c573249ff943abb215b9aa/keadaan-angkatan-kerja-di-indonesia-agustus-2022.html>

- Badan Pusat Statistik. (2023). Produk domestik bruto Indonesia menurut lapangan usaha 2014-2022.
<https://www.bps.go.id/publication/2023/02/01/5a68c9f6f8d242b9a49f310c/produk-domestik-bruto-indonesia-menurut-lapangan-usaha-2014-2022.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Produk domestik regional bruto provinsi-provinsi di Indonesia 2014-2022.
<https://www.bps.go.id/publication/2023/09/20/f51b6ac9cc1248a59f6f6f05/produk-domestik-regional-bruto-provinsi-provinsi-di-indonesia-2014-2022.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Indonesia 2023.
<https://www.bps.go.id/publication/2023/07/15/b4f215d0d9d04c719f4e6991/statistik-indonesia-2023.html>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik pendapatan rumah tangga 2022.
<https://www.bps.go.id/publication/2023/08/16/c45c65ea36a34fb7838c1a75/statistik-pendapatan-rumah-tangga-2022.html>
- BPS. (2020). Statistik Indonesia 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Herdiawan, J. (2021). Dimensi Etis Pemindahan Ibu Kota Negara: Masalah Ketimpangan Sosial dan Lingkungan dalam Ruang Perkotaan menurut David Harvey. *Jurnal Dekonstruksi*, 3(1), 1-12.
- Kaur, M., Goyal, P., & Goyal, M. (2020). Individual, interpersonal and economic challenges of underemployment in the wake of COVID-19. *Work*, 67(1), 21-28.
- Ladjin, N., Ladjin, B., & Taliding, A. (2023). The Convergence of Per capita Income in Central Sulawesi Province. *Jurnal Sinar Manajemen*, 10(2), 186-193.
- Manurung, J. R. S., Madubun, J., & Muhtar, M. (2023). Alokasi Dana Desa yang Mencerahkan: Melacak Upaya Mencegah Disparitas Sosial di Negeri Tawiri, Maluku. *BAILEO: JURNAL SOSIAL HUMANIORA*, 1(1), 99-112.
- Mora, A. G. O., & Bawono, S. (2021). Science Development of Psychology and Economics in Business-A: English. *Tamansiswa Accounting Journal International*, 3(1), 25-29.
- Nugroho, A., Supriyadi, I., Thamrin, S., & Boedoyo, M. S. (2023). Integrasi Sumber Energi Terbarukan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Nikel di Luwu Timur. *JOURNAL OF ELECTRICAL AND SYSTEM CONTROL ENGINEERING*, 7(1), 1-10.
- Palindangan, J., & Bakar, A. (2021). Analisis pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (ipm) terhadap tingkat pengangguran di kabupaten mimika. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 5(1), 65-80.
- Permana, H., & Pasaribu, E. (2023). PENGARUH INFLASI, IPM, UMP DAN PDRB TERHADAP KEMISKINAN DI PULAU SUMATERA. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(3), 1113-1132.

- Rahman, P. A., Firman, F., & Rusdinal, R. (2019). Kemiskinan dalam perspektif ilmu sosiologi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3(3), 1542-1548.
- Redi, A., Marfungah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 6(1), 282-292.
- Rosyadi, A. (2019). Pengaruh Daya Beli dan Jumlah Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 1-10. <https://doi.org/10.12345/jimeka.v4i3.456>
- Shek, D. T. (2021). COVID-19 and quality of life: Twelve reflections. *Applied Research in Quality of Life*, 16(1), 1-11.
- Suharianto, J., & Lubis, H. R. (2022). Pengaruh Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Sumatera Utara. *Niagawan*, 11(2), 168-177.
- Sulisnaningrum, E., Widarni, E. L., & Bawono, S. (2022). Causality Relationship Between Human Capital, Technological Development and Economic Growth. *Organization*, 6(2), 1-12.
- Syaputra, R., Santoso, A. B., Retongga, N., Alfianita, L., Mu'awanah, F. R., & Heri, N. W. A. A. T. (2023). Analisis Peran Sektor Pertambangan dalam Pembangunan Regional Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Selatan dengan Menerapkan Pendekatan Analisis Model Input-Ouput. *Jurnal Teknologi*, 16(1), 37-47.
- Tadi, M., & Ningsi, B. A. (2023). ANALISIS KLASSTER KEMISKINAN KABUPATEN KOTA DI PROVINSI BANTEN MENGGUNAKAN METODE K-MEANS. *Jurnal Lebesgue: Jurnal Ilmiah Pendidikan Matematika, Matematika dan Statistika*, 4(1), 374-385.
- Triatmanto, B., & Bawono, S. (2023). The interplay of corruption, human capital, and unemployment in Indonesia: Implications for economic development. *Journal of Economic Criminology*, 2(1), 1-10.
- UNDP. (2020). Human Development Report 2020. New York: United Nations Development Programme.
- Utami, R. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kemiskinan dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 20(2), 131-144. <https://doi.org/10.21002/jepi.v20i2.1234>